



## **MERDEKA BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN AGAMA HINDU PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN PROGRESIVISME**

Oleh

**Gede Agus Siswadi**

**Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada**

<sup>1</sup>[lindawatii918@gmail.com](mailto:lindawatii918@gmail.com), <sup>2</sup>[zanjudode@gmail.com](mailto:zanjudode@gmail.com), <sup>3</sup>[kiriana@uhnsugriwa.ac.id](mailto:kiriana@uhnsugriwa.ac.id)

Diterima: 30 Juli 2022, Direvisi: 21 April 2023, Diterbitkan: 30 April 2023

### **Abstract**

*Freedom to learn is a new education policy in Indonesia that requires a big change for the better than the previous education. Freedom to learn is present as an instrument that was born from the merger of educational theory and previous policies. Freedom to learn and the educational philosophy of progressivism have the same goal, namely to provide a wide space for students, teachers, and also educational institutions to design a series of learning that is liberating, democratic, independent, and also free to innovate. This study uses a qualitative method with a philosophical hermeneutic approach and uses Miles and Huberman's data analysis patterns. The results of this study are the educational philosophy of progressivism emphasizes that students must develop naturally, experience is the key word in motivating children's learning, teachers act as facilitators in learning, and the curriculum must be designed student-centred. The concept of independent learning in principle provides a wide space for exploring the greatest potential for teachers and students to innovate and improve the quality of learning independently. Then the application of freedom to learn in Hindu religious learning is to provide space for students, teachers, and schools to always are free in thinking, free to innovate, and independent in creativity so that the concept of education that relies on "sa vidya ya vimuktaye" or learning is what liberating humanity can be achieved.*

**Keywords:** *Freedom of Learning, Hindu Religion Learning, Education, Progressivism*

### **I. PENDAHULUAN**

Sebelum berangkat lebih jauh berkaitan dengan konsep merdeka belajar yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, sangatlah penting kiranya untuk memahami konsep pendidikan secara utuh. Karena sejatinya pendidikan telah dimulai sejak manusia ada di muka bumi ini, dalam artian adanya pendidikan dapat dikatakan setua dengan adanya kehidupan manusia itu sendiri. Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, maka berkembang pulalah isi serta bentuk penyelenggaraan pendidikan. Hal ini tentunya sejalan dengan kemajuan manusia dalam pemikiran dan ide-ide tentang pendidikan.

Seorang pakar pendidikan George F. Kneller menjelaskan bahwa pendidikan dapat dipandang dalam arti luas serta dalam arti teknis atau dalam arti hasil maupun dalam arti proses. Pendidikan yang dimaksud dalam arti luas bertujuan sebagai suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan jiwa (*mind*), watak (*character*), atau kemampuan fisik (*physical ability*). Pendidikan dalam artian ini merupakan sebuah pendidikan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terus-menerus (seumur hidup). Sedangkan, pendidikan dalam arti teknis menurut Kneller merupakan suatu proses di mana masyarakat, melalui

lembaga-lembaga pendidikan (dalam hal ini sekolah), dengan sengaja mentransformasi warisan budayanya, yaitu berupa pengetahuan, nilai-nilai, serta berupa keterampilan-keterampilan dari generasi ke generasi (Kneller, 1971).

Lebih lanjut dijelaskan dalam (Pratama, 2015) bahwa pendidikan merupakan faktor yang utama untuk membangun peradaban suatu bangsa. Masyarakat suatu bangsa memperoleh suatu pengetahuan, seperti dari mana asal-usul dan tujuan hidupnya melalui pendidikan. Kesadaran akan arti penting pendidikan dapat menentukan kualitas kesejahteraan dan masa depan masyarakat. Tanpa pendidikan, dapat dipastikan manusia akan kehilangan hidup dan tujuan. Dengan demikian, pendidikan merupakan tiang pancang kebudayaan dan fondasi utama untuk membangun peradaban sebuah bangsa. Pendidikan sekalipun dianggap sebagai tiang pembangunan peradaban bangsa, nyatanya masalah yang terkandung di dalam tubuh pendidikan masih terbilang “luas” serta muncul dari berbagai aspek. Mulai dari ketidakmerataan sarana dan prasana di berbagai wilayah, kualitas pendidik yang masih terbilang belum sama dengan standar kompetensi hingga metode pengajaran di sekolah yang masih meletakkan guru sebagai pusat pembelajar, oleh karenanya secara tidak langsung akan membuat siswa menjadi pasif dan kurang berkembang sebagai pribadi yang kritis.

Padahal sangatlah jelas termuat di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, menjelaskan bahwa “*Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.*” Definisi ini sangat jelas mencerminkan bahwa proses pendidikan harus mengedepankan peran aktif peserta didik yang berarti pula bahwa proses pendidikan sudah semestinya menjadikan peserta didik sebagai subyek kurikulum, bukan sekadar obyek kurikulum, sudah seharusnya setiap peserta didik diberi hak dan juga kesempatan untuk ikut menentukan apa yang terbaik untuk dirinya.

Hal tersebut mengandung makna bahwa pendidikan semestinya memperlihatkan minat dan kebutuhan peserta didiknya dalam memilih dan menentukan kurikulum yang akan dijalaninya sebagai bekal hidup yang diperlukan untuk mengukir masa depan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan sudah seharusnya mampu memberikan suasana nyaman, aman dan menggairahkan bagi peserta didik untuk senantiasa belajar yang berguna untuk memenuhi hasrat keingintahuannya. Dengan demikian, setiap peserta didik akan mampu tumbuh dan berkembang sesuai minat, kebutuhan, karakteristik gaya belajarnya masing-masing (Kho, 2007).

Demikian pula halnya dalam pembelajaran agama Hindu sangat penting untuk mendesain kembali pendidikan yang memiliki keberpihakan pada anak. Sudah semestinya kolaborasi antara materi pelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, pendekatan pembelajaran serta media pembelajaran memberikan nuansa yang menyenangkan serta memotivasi anak untuk dapat belajar dalam situasi yang bahagia. Pendidikan yang otoriter serta klasik semestinya harus ditinggalkan, karena pembelajaran dengan nuansa otoriter akan menghasilkan anak-anak yang tidak memiliki rasa percaya diri, selalu dibayang-bayangi oleh rasa salah, dan sebagainya. Sehingga konsep merdeka belajar yang dicanangkan oleh Mendikbudristek telah memberikan angin segar pada pembaharuan pembelajaran yang tidak lagi berpusat pada guru, namun siswa diberikan kebebasan untuk belajar serta memerdekakan. Konsep merdeka belajar memiliki kesenadaan dengan aliran filsafat pendidikan progresivisme yang sama-sama menekankan progres yang seluas-luasnya dalam pendidikan. Progresivisme juga menekankan bagaimana pendidikan dengan sistem demokrasi. Atas dasar hal tersebutlah, penelitian ini berupaya untuk menggali lebih dalam seperti apa secara aplikatif merdeka belajar dalam pembelajaran agama Hindu dalam perspektif filsafat pendidikan progresivisme.

## II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan hermeneutik filosofis yakni dengan melakukan telaah filosofis, serta penafsiran kritis (Bakker & Zubair, 1990). Obyek formal dalam penelitian ini adalah aliran filsafat pendidikan progresivisme, sedangkan obyek materialnya adalah konsep merdeka belajar dalam pembelajaran agama Hindu. Data dalam penelitian ini dihimpun dengan metode studi kepustakaan, sebagaimana yang dijelaskan oleh (Zed, 2004), studi kepustakaan adalah sebuah metode melalui pembacaan, pencatatan dan penelaahan berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari telaah dokumen seperti artikel ilmiah, skripsi, buku, serta beberapa karya ilmiah lainnya yang

memiliki relevansinya dengan penelitian ini. Data yang telah dihimpun dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan pola analisis Miles dan Huberman yakni dari data yang dikoleksi, kemudian reduksi data, serta penyajian data. Simpulan dalam penelitian ini akan diberikan setelah data secara keseluruhan telah dianalisis.

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1 Landasan Filosofis Filsafat Pendidikan Progressivisme

Progressivisme pada dasarnya berasal dari gerakan reformasi umum dalam kehidupan masyarakat dan politik Amerika di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Aliran ini merupakan sebuah anti tesis dari pendidikan tradisional, dalam artian pendidikan progresif berupaya untuk merancang berbagai strategi untuk dapat mereformasi pendidikan. Progressivisme sering berkaitan dengan eksperimentalisme John Dewey, gerakan pendidikan progresif menggabungkan beragam rangkaian unsur. Kaum progresif memfokuskan pada pendidikan yang berpusat pada kebebasan anak didik dari sekolah-sekolah otoriter. Kaum reformis sosial ingin menggunakan sekolah untuk mereformasi masyarakat, sementara beberapa kaum progresif berusaha untuk menggunakan pendidikan untuk reformasi sosial yang berkonsentrasi untuk membuat sekolah lebih banyak, efisien dan hemat biaya (Ornstein & Levine, 2007).

Filsafat progressivisme menuntut kepada para penganutnya untuk selalu maju (*progress*), bertindak selalu konstruktif, inovatif, reformatif, aktif dan dinamis, sebab naluri manusia selalu menginginkan perubahan-perubahan. Manusia pada dasarnya tidak ingin hanya menerima satu macam keadaan, tetapi juga ingin hidupnya tidak sama dengan masa sebelumnya, dan untuk mendapatkan perubahan tersebut, manusia harus memiliki pandangan hidup yang bertumpu pada sifat-sifat yang cenderung fleksibel, dalam artian tidak menolak perubahan dan tidak terikat oleh doktrin tertentu, *curious* (ingin mengetahui dan menyelidiki), toleran dan *open minded* (berpikiran terbuka) (Bernadib, 1997).

Pendidikan progressivisme lahir untuk mendobrak metode-metode pendidikan yang telah langgeng pada sistem pendidikan tradisional. Pada sistem pendidikan tradisional, sangatlah kental dengan nuansa bahwa guru hanya mengajar serta mendiktekan materi ajar sesuai dengan mata pelajarannya, kemudian peserta didik menuliskannya pada buku catatan masing-masing, peserta didik kemudian mempelajari inti pokok dari yang dipelajarinya dalam buku catatan dan kemudian dihadapkan kepada teks buku peserta didik. Guru menjalankan tugasnya sepanjang pelajaran berlangsung, kecuali pada saat peserta didik diperintahkan untuk menghafalkan bahan pelajaran dan peserta didik duduk pada jajaran meja tulis dan peserta didik boleh berbicara kecuali dengan izin dari guru. Dengan demikian, dapat digambarkan bahwa pendidikan tradisional sangat menekankan 1) otoritas penuh dari guru pengajar, 2) menekankan metode instruksi pada buku teks, 3) pengajaran pasif melalui ingatan atas materi yang dipelajari, 4) pendidikan terisolasi dari realitas, dan 5) hukuman badan sebagai sebuah bentuk untuk menegakkan disiplin. Dengan kata lain bahwa sistem pendidikan yang ditekankan adalah disiplin yang kuat dan tegas serta pemberian hukuman diupayakan untuk membangun tata tertib dalam proses belajar mengajar (Nanuru, 2013).

Progressivisme muncul untuk mereformasi metode-metode pendidikan tradisional, apa yang dilakukan oleh pendidikan tradisional, maka hal sebaliknya yang dilakukan oleh progressivisme. Pendidikan progressivisme lebih menekankan aktivitas dan juga informalitas dalam kelas, serta meyakini bahwa peserta didik akan belajar lebih baik ketika dapat bergerak dan bekerja dengan cara dari peserta didik sendiri. Dalam pelaksanaan proses belajar tersebut peserta didik dituntut untuk mengumpulkan materi-materi dari beberapa sumber, bukan hanya dari satu buku teks saja yang telah ditentukan, tetapi penyelesaian masalah tersebut dilaksanakan secara berkelompok dengan peserta didik yang lainnya (Ruslan, 2018). Prinsip-prinsip pendidikan yang dianut oleh aliran progressivisme seperti 1) anak-anak senantiasa dibiarkan bebas dan berkembang secara alami, 2) perhatian di dorong langsung pada pengalaman, karena ini dianggap sebagai pendorong yang paling baik dalam pengajaran, 3) guru menjadi narasumber, seorang pembimbing, dan pengarah dalam aktivitas pembelajaran, 4) sekolah progressivisme seharusnya menjadi sebuah laboratorium bagi reformasi pendidikan dan tempat untuk eksperimen (Nanuru, 2013).

Hal yang senada juga dijelaskan oleh (Kneller, 1971) bahwa secara prinsip pendidikan progressivisme lebih mendefinisikan pendidikan sebagai hidup itu sendiri, bukan persiapan untuk hidup. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang intelegen yang dapat menggunakan akal untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan, yakni kehidupan yang mencakup interpretasi dan juga

rekonstruksi pengalaman. Sistem pengajaran lebih diorientasikan secara langsung dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan anak-anak. Dengan kata lain, belajar melalui pemecahan masalah harus diutamakan ketimbang dengan belajar melalui *subject matter*. Peran guru juga lebih kepada pemberi petunjuk pada peserta didik. Bagi progresivisme, sekolah lebih diarahkan untuk mendorong kerjasama disbanding kompetisi.

Apabila dilihat secara utuh pendidikan progresivisme dalam bingkai filosofis yang terpaut di dalamnya dimensi ontologis, epistemologis, dan juga aksiologisnya. Maka akan tergambar bahwa pada dimensi ontologi pendidikan progresivisme mengandaikan bahwa kenyataan alam semesta merupakan kenyataan kehidupan manusia. Pengalaman adalah kunci pengertian manusia terhadap segala sesuatu. Pengalaman tentang penderitaan, kesedihan, kegembiraan, keindahan, dan lain-lain adalah realitas manusia sampai mati. Pengalaman adalah suatu sumber evolusi, yang berarti perkembangannya maju setapak demi setapak, mulai dari yang mudah-mudah hingga menerobos pada yang sulit-sulit (proses perkembangannya lama). Pengalaman adalah perjuangan, sebab hidup berkembang jika manusia mampu mengatasi perjuangan, perubahan dan berani bertindak. Pandangan ontologis progresivisme bertumpu pada tiga hal yakni asas *hereby* (asas keduniawian), pengalaman sebagai realita dan pikiran (*mind*) sebagai fungsi manusia yang unik (Jalaluddin & Idi, 2002).

Pandangan epistemologis progresivisme menekankan bahwa pengetahuan itu merupakan informasi, fakta, hukum, prinsip, proses, dan kebiasaan yang terakumulasi secara pribadi sebagai proses interaksi dan pengalaman. Pengetahuan yang diperoleh manusia, baik secara langsung melalui pengalaman dan kontak dengan segala realitas dalam lingkungan, ataupun pengetahuan diperoleh langsung melalui catatan-catatan. Pengetahuan adalah hasil aktivitas tertentu. Makin sering manusia menghadapi tuntutan lingkungan dan makin banyak pengalaman manusia dalam praktik, maka makin besar persiapan manusia dalam menghadapi tuntutan masa depan. Pengetahuan harus disesuaikan dan dimodifikasi dengan realita baru di dalam lingkungan. Kebenaran adalah kemampuan suatu ide memecahkan masalah, kebenaran adalah konsekuensi daripada suatu ide, realitas pengetahuan adalah daya guna dalam hidup (Jalaluddin & Idi, 2002).

Sedangkan dalam pandangan aksiologis pendidikan progresivisme menekankan bahwa nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa, dan dari sinilah adanya pergaulan. Masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai-nilai. Bahasa adalah sarana ekspresi yang berasal dari dorongan, kehendak, perasaan, dan kecerdasan dari individu-individu. Nilai benar atau salah, baik atau buruk, dapat dikatakan ada bila menunjukkan kecocokan dengan hasil pengujian yang dialami manusia dalam pergaulan manusia (Jalaluddin & Idi, 2002).

Progresivisme dalam pendidikan memberikan titik tekan bahwa seorang pendidik memberikan kepada para peserta didik kebebasan dalam menentukan pengalaman-pengalaman yang didapatkan di sekolah. Pendidik progresif memulai dengan posisi di mana keberadaan peserta didik melalui interaksi keseharian di kelas, mengarahkan peserta didik untuk melihat bahwa mata pelajaran yang akan dipelajari dapat meningkatkan hidup. Pendidik dalam pandangan progresivisme adalah sebagai penasehat, pembimbing, pengarah dan bukan sebagai orang pemegang otoritas penuh yang dapat berbuat apa saja (otoriter) terhadap siswanya. Pembimbing dan pendidik mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang banyak di bidang anak didik, maka secara otomatis semestinya pendidik akan menjadi penasehat ketika anak didik mengalami jalan buntu dalam memecahkan persoalan yang dihadapi, oleh karena itu, peran utama pendidik adalah membantu peserta didik akan berkembang menjadi orang dewasa yang mandiri dalam suatu lingkungannya yang terus mengalami perubahan (Gutek, 1997).

Progresivisme memandang segala sesuatu berasaskan fleksibilitas, dinamika dan sifat-sifat lain yang sejenis. Tercermin dalam pandangannya mengenai kurikulum sebagai pengalaman yang edukatif, bersifat eksperimental dan adanya rencana serta susunan yang teratur. Pengalaman yang edukatif adalah pengalaman yang sesuai dengan tujuan prinsip-prinsip yang digariskan dalam pendidikan, yang setiap proses belajarnya membantu pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Fleksibelitas dapat membuka kemungkinan bagi pendidikan untuk memperhatikan anak didik dengan sifat-sifat dan kebutuhannya masing-masing sesuai dengan keadaannya. Oleh karena itu, sifat kurikulum progresivisme yang tidak beku dan dapat direvisi, maka jenis kurikulum yang memadai adalah kurikulum yang “berpusat pada pengalaman”. Jenis ini dilukiskan oleh Theodore Brameld sebagai kurikulum yang melepaskan semua garis penyekat mata pelajaran dan menekankan pada unit-unit (Bernadib, 1997).

Ringkasnya, progresivisme secara positif menegaskan bahwa, *pertama*, anak didik harus berkembang secara alami, *kedua*, minat belajar dari peserta didik dimotivasi oleh pengalaman langsung yang merupakan rangsangan terbaik untuk belajar, *ketiga*, guru harus memfasilitasi pembelajaran, *keempat*, kerja sama yang erat sangat penting antara sekolah dan rumah, dan *kelima*, sekolah yang progresif harus menjadi laboratorium untuk eksperimen. Menentang kurikulum materi pelajaran konvensional, para pendidik progresif yang berpengalaman dengan kurikulum alternatif, menggunakan aktivitas, pengalaman, pemecahan masalah, dan proyek. Pendidik progresif yang berpusat pada anak berusaha membebaskan anak-anak dari hambatan dan represi secara konvensional.

### 3.2 Merdeka Belajar dalam Tinjauan Progresivisme

Merdeka belajar merupakan program pendidikan baru yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yakni Nadiem Anwar Makarim dengan semangat dan keinginan untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor ataupun nilai tertentu (Mustaghfiroh, 2020). Secara prinsip merdeka belajar yang telah dicanangkan oleh Mendikbudristek ini adalah memberikan ruang yang lebar terhadap penggalian potensi terbesar bagi para guru dan juga siswa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tetapi benar-benar inovasi pendidikan.

Merdeka belajar juga dirancang untuk mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada esensi undang-undang dengan memberi kebebasan kepada sekolah, guru dan juga siswa untuk bebas berinovasi, bebas untuk belajar dengan mandiri dan kreatif, di mana kebebasan untuk berinovasi ini harus dimulai dari guru sebagai penggerak pendidikan nasional. Terdapat tiga hal yang menjadi tahapan penting dalam merdeka belajar yakni, *Pertama*, membangun ekosistem pendidikan yang berbasis teknologi. Untuk meningkatkan kompetensi para pendidik inilah, penting untuk menyiapkan ekosistem pendidikan dan teknologi yang berkualitas. Ekosistem pendidikan yang didukung teknologi tentulah sangat penting untuk mendorong munculnya kreatifitas, inovasi, sekaligus karakter penggerak bagi pendidik. *Kedua*, yakni kolaborasi dengan lintas pihak. Untuk berjuang bersama pada masa kini, perlu kolaborasi dengan sebanyak mungkin pihak. Dan yang *ketiga*, adalah pentingnya data. Dalam hal ini diperlukan juga perencanaan dengan matang dan aplikasi yang tepat sasaran, untuk mendukung visi-misi pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Lebih lanjut dalam konteks implementasi dari merdeka belajar secara esensialnya adalah kemerdekaan berpikir. Utamanya dalam kemerdekaan berpikir ini harus ada pada guru terlebih dahulu. Tanpa diawali oleh guru, tidak akan mungkin bisa terjadi pada peserta didik (murid). Hal ini akan terjadi apabila seorang pendidik memiliki kemerdekaan dalam mengajar. Satu pertanyaan yang wajib dijawab secara bersama adalah apakah kita sebagai seorang pendidik sudah merasa merdeka dalam mengajar? Itu adalah konsep awal dalam mewujudkan kemerdekaan dalam belajar. Dengan demikian, merdeka belajar prinsipnya merupakan tindakan yang bebas dalam mengekspresikan peristiwa belajar tanpa ada batasan dan kritikan. Merdeka belajar dapat dimaknai belajar yang tidak mengejar target paksaan, belajar itu butuh waktu yang tentu tidak pernah berkurang dari berbagai inovasi. Peserta didik membutuhkan sesuatu yang berbeda dari guru.

Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam mengimplementasikan merdeka belajar diantaranya adalah 1) Kepala Sekolah diharapkan untuk menerapkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan merdeka belajar, 2) Guru dituntut untuk dapat menjadi sosok yang terbuka dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, 3) Peserta didik, hendaknya psikologi peserta didik dalam keadaan siap dan suasana hati yang bahagia, mulai dibiasakan untuk berpikir kritis dan selalu bersikap ingin tahu serta mampu menganalisis pertanyaan terbuka, 4) Wali siswa dan lingkungan, yakni dilibatkan secara aktif dalam pemantauan hasil belajar peserta didik dan mendukung kesinambungan antara sekolah, rumah dan lingkungan, 5) Dinas pendidikan dan kebudayaan diharapkan untuk menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para guru dan menyediakan pendampingan saat pelaksanaan merdeka belajar (Kemendikbud, 2020).

Terdapat empat pokok program yang dilaksanakan dalam penerapan merdeka belajar yang telah dicanangkan oleh Kemendikbud, yakni pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), dengan melihat Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, khususnya pada Pasal 2, Ayat 1 menyatakan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh

satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan semua mata pelajaran. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 5, Ayat 1 bahwa bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berupa portofolio, penugasan, tes tertulis, atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan standar nasional pendidikan (Sopacua & Fadli, 2022).

Demikian pula dijelaskan dalam Pasal 6, Ayat 2 bahwa untuk kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan/ program pendidikan yang bersangkutan. Dengan demikian, apabila melihat secara utuh Permendikbud tersebut menunjukkan bahwa guru dan sekolah lebih merdeka untuk menilai hasil belajar siswa. Secara aplikatifnya USBN diganti menjadi ujian (asesmen). Kebijakan mengganti USBN dengan asesmen ini berlaku pada tahun 2020, yang menekankan pada kompetensi siswa. anggaran USBN juga dialihkan untuk meningkatkan kualitas guru dan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan.

Berikutnya adalah pada program Ujian Nasional (UN) yang merupakan kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu sesuai dengan Permendikbud No. 43 Tahun 2019. Pada tahun 2021 UN akan digantikan dengan istilah lain yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter. Asesmen dimaksudkan untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk bernalar menggunakan bahasa dan literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Adapun untuk teknis pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan di tengah jenjang sekolah, misalnya di kelas 4, 8 dan 11, dengan maksud untuk dapat mendorong guru dan sekolah dalam memetakan kondisi pembelajaran, serta mengevaluasi sehingga dapat memperbaiki mutu pembelajaran.

Terkait dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter, dimaksudkan supaya setiap sekolah bisa menentukan model pembelajaran yang lebih cocok untuk murid-murid, daerah, dan juga kebutuhan mereka, serta Asesmen Kompetensi Minimum tidak sekaku UN. Aspek kognitif AKM, menurut Mendikbud materinya dibagi menjadi dua bagian yakni 1) Literasi; bukan hanya kemampuan untuk membaca, tapi juga kemampuan menganalisa suatu bacaan, kemampuan memahami konsep di balik tulisan tersebut, kemudian 2) Numerasi; berupa kemampuan menganalisa, menggunakan angka-angka. Jadi hal tersebut bukanlah berdasarkan mata pelajaran lagi, bukan penguasaan konten atau materi. Namun, hal ini berdasarkan pada kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk bisa belajar, apapun mata pelajarannya.

Selanjutnya adalah penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sesuai dengan surat edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019, tentang penyederhanaan RPP, yang isinya meliputi: 1) penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa, 2) dari 13 komponen RPP yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (asesmen) yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan sisanya sebagai pelengkap, dan 3) Sekolah, Kelompok Guru Mata Pelajaran dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru/Musyawaharah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP) dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP yang telah dibuat dapat digunakan dan dapat disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3. Guru diberikan keleluasaan dalam proses pembelajaran untuk memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP, sebab gurulah yang mengetahui kebutuhan siswa didiknya dan kebutuhan khusus yang diperlukan oleh siswa di daerahnya, karena karakter dan kebutuhan siswa di masing-masing daerah bisa berbeda.

Selama ini administrasi pendidikan yang berupa RPP memang memuat terlalu rinci sehingga mengalihkan waktu pendidik untuk mengajar dan meningkatkan kompetensi. Dalam kebijakan merdeka belajar ini RPP akan dipersingkat hanya satu halaman yang berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen atau evaluasi pembelajaran. Dengan adanya upaya penyederhanaan RPP ini maka diharapkan kepada para pendidik untuk lebih banyak berinteraksi dengan para siswanya secara aktif, dinamis, dengan pembelajaran tidak cenderung menekan, kaku, serta kaku dan rumit.

Program merdeka belajar selanjutnya adalah memperluas sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru (PPDB). Merujuk dari Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB 2020, sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 11, dalam persentase pembagiannya meliputi 1) untuk jalur zonasi paling sedikit 50 persen, 2) jalur afirmasi paling sedikit 12 persen, 3) jalur perpindahan tugas

orang tua/wali siswa meliputi lima persen, dan 4) jalur prestasi (sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua/wali meliputi 0-30 persen). Jelas hal ini berbeda dengan kebijakan PPDB sebelumnya, setidaknya terdapat dua hal penting yakni: 1) kuota penerimaan siswa baru lewat jalur berprestasi semula 15 persen, sekarang menjadi 30 persen, dan 2) adanya satu penambahan baru jalur PPDB, yaitu melalui jalur afirmasi, yang ditujukan terutama bagi mereka yang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dengan demikian untuk PPDB 2020 masih tetap menggunakan sistem zonasi, akan tetapi pelaksanaannya lebih bersifat fleksibel, dengan maksud agar dapat mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Terpenting dalam proporsi finalisasinya, daerah berwenang untuk menentukan dan menetapkan wilayah zonasinya.

Merdeka belajar hadir sebagai instrumen yang lahir dari penggabungan teori pendidikan dan kebijakan sebelumnya dengan kriteria-kriteria tertentu, misalnya memposisikan siswa sebagai subyek, relasi antara guru dengan penghapusan batas hierarki, kondisi ruang belajar, materi pembelajaran, sistem pembelajaran dan lain sebagainya sehingga proses pendidikan menjadi ideal sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan melihat kekurangan pada konsep pendidikan sebelumnya, tidak menjadikan merdeka belajar menjadi konsep pendidikan yang sempurna. Merdeka belajar tentu masih membutuhkan pengembangan dan inovasi, namun setidaknya konsep merdeka belajar sejalan dengan konsep filsafat pendidikan progresivisme. Merdeka belajar memberikan kemerdekaan pada guru dan siswa untuk berinovasi, belajar dengan mandiri serta kreatif.

Merdeka belajar pada praktiknya menyediakan ruang bagi anak untuk memiliki pengalaman-pengalaman positif dan belajar dari pengalaman tersebut, sehingga anak mampu berkembang dengan baik. Selain itu, merdeka belajar memiliki bentuk serta konsep yang cukup cair sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi tuntutan tanpa melepaskan esensinya sebagai sebuah sudut pandang yang meletakkan anak-anak sebagai subyek utama. Merdeka belajar berangkat dari hasrat alami anak-anak yang artinya sama dengan pandangan progresivisme (Kilpatrick, 1980) yang berangkat dari hasrat alami manusia secara universal.

Dengan demikian, dapat dibingkai bahwasanya merdeka belajar pada prinsipnya menapaki aliran filsafat pendidikan progresivisme, yakni antara merdeka belajar dengan pendidikan progresivisme sama-sama menekankan pada aspek kebebasan, kemerdekaan, dan keleluasaan lembaga pendidikan dalam eksplorasi secara maksimal kompetensi dari peserta didik, dengan kata lain antara progresivisme dan merdeka belajar menekankan bahwa si pembelajar harus bebas dan berkembang secara natural, pembelajaran berbasis pada pengalaman langsung, guru sebagai fasilitator, pemangku lembaga sebagai penyedia laboratorium pendidikan, aktivitas di rumah dan di sekolah harus kooperatif. “Kebebasan” atau “Kemerdekaan” sebagai unsur penting dalam lingkungan belajar. Dan sebagai catatan akhir, filsafat pendidikan progresivisme merupakan kerangka pikir pemecahan masalah-masalah pembelajaran dengan merancang beragam tindakan belajar sesuai dengan karakter peserta didik, menuju tujuan yang beragam dengan strategi yang beragam, dan dengan melibatkan sumber-sumber yang beragam. Hal itu sesuai dengan konsep “Merdeka Belajar” yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengenai kemerdekaan dalam belajar.

### **3.3 Merdeka Belajar dalam Pembelajaran Agama Hindu**

Pendidikan yang mengacu pada filsafat progresivisme idealnya telah sejalan dengan pertumbuhan manusia. Hal tersebut diasumsikan bahwa manusia selalu mengalami perkembangan secara dinamis sepanjang manusia itu tumbuh dan berkembang di zamannya, begitu pula pada aspek pendidikan dari manusia tersebut akan menyesuaikan dengan perkembangan dari manusia itu sendiri. Sehingga konsep pendidikan yang menekankan bahwa pendidikan sepanjang hayat (*long live education*) juga menekankan pada penyesuaian dengan kondisi zaman (Faiz & Kurniawaty, 2020). Hal inilah yang pada dasarnya senada dengan konsep merdeka belajar yang dicanangkan oleh Mendikbudristek, yang pada dasarnya memberikan kebebasan di bidang pendidikan.

Merdeka belajar juga merujuk pada sebuah upaya dalam kemerdekaan berpikir (Daga, 2021), merdeka berpikir di sini bertujuan agar guru dan juga peserta didik mendapatkan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran. Dalam konsep kemerdekaan berpikir dapat diimplementasikan bahwa seorang pendidik seharusnya menjadikan dirinya sebagai teman belajar siswa, dengan mendesain pembelajaran yang menyenangkan agar siswa memiliki kesadaran diri dan merdeka dalam menentukan pilihan-pilihan belajarnya (Eliana et al., 2021). Kemerdekaan berpikir siswa akan dapat berkembang dengan baik manakala pendidikan bersifat demokratis, dan siswa telah mendapatkan

sebuah kebebasan dan kemerdekaan belajar, baik menyangkut materi ataupun strategi, dan juga media pembelajaran (Rahayu et al., 2022).

Konteksnya dalam pembelajaran agama Hindu juga pada dasarnya memberikan penekanan-penekanan bahwa suatu pendidikan bukanlah dalam ruang yang berisikan sederatan doktrin ataupun pembelajaran agama yang secara kaku, rigid, ataupun belum disesuaikan dengan kemampuan dari kognitif dan psikologis siswa. Seorang anak didik diberikan kebebasan untuk memproses aktivitas berpikirnya hingga mampu untuk menangkap realitas di luar dirinya serta dapat menemukan realitas kebenaran tentang realitas itu. Seorang pendidik, semestinya dapat melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir secara optimal. Karena pada dasarnya siswa akan mampu untuk menangkap dan menginterpretasikan kebenaran secara obyektif dan juga mendalam makakala terdapat kebebasan dalam proses berpikir. Walaupun memang kebebasan berpikir tidak terikat pada nilai, namun secara aksiologis implikasi kebebasan berpikir manusia dibatasi oleh tanggung jawab dan moralitas individu dalam masyarakat.

Kemerdekaan berpikir yang diaplikasikan dalam konsep merdeka belajar akan cenderung memberikan warna serta nuansa yang baru dalam rangkaian proses pembelajaran. Peran pendidik dalam mewujudkan suasana yang merdeka dalam belajar sangatlah penting, guru dituntut untuk memerdekakan dirinya sebelum memerdekakan siswanya dalam pembelajaran. Dengan kata lain, siswa merdeka dalam belajar apabila guru telah merdeka dalam mengajar. Dalam konsep pendidikan Hindu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Machwe dalam (Atmadja & Atmadja, 2008) yakni *sa vidya ya vimuktaye* artinya pembelajaran adalah yang membebaskan manusia. Pernyataan tersebut jelas menekankan bahwa konsep merdeka belajar dalam pembelajaran agama Hindu berupaya untuk menciptakan peserta didik yang memiliki jiwa merdeka, dengan tidak lagi terkekang oleh berbagai ketentuan dan peraturan pembelajaran (Budiwati & Fauziati, 2022).

Mengutip dalam kitab Manawa Dharmasastra IV. 12 "*samtosam paramāsthāva sukharthī samyato bhavet. Samtosamūlam hi sukham dhukhamūlam viparyayah*" yang artinya bahwa seorang siswa yang sungguh-sungguh menginginkan kebahagiaan harus selalu berusaha untuk mencapai keadaan yang penuh dengan kelegaan (ketenangan) yang sempurna dan selalu dapat menguasai diri sendiri, karena ketenangan itu adalah akar dari pohon kebahagiaan, sedangkan akar dari kesedihan adalah ketidaknetenangan (Gunada, 2020). Peserta didik dalam pembelajaran agama Hindu melalui konsep merdeka belajar ini semestinya diposisikan sangat sentral dalam proses pembelajaran. Peserta didik lebih cenderung belajar secara alamiah dan menemukan sesuatu di lingkungan sekitarnya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi dalam kehidupannya. Peserta didik memiliki potensi yang akan dikembangkan menjadi kompetensi untuk memecahkan masalahnya. Tugas guru adalah meningkatkan kecerdasan potensial yang telah dimiliki sejak lahir oleh peserta didik menjadi kecerdasan realitas dalam pendidikan untuk dapat merespons segala perubahan yang terjadi di lingkungan (Pohan, 2019).

Selanjutnya yang penting untuk ditekankan dalam merdeka belajar pada pembelajaran agama Hindu adalah merdeka berinovasi. Pada prinsipnya, dalam sebuah pendidikan inovasi menjadi sebuah keseharusan untuk membawa perubahan secara kualitatif siswa dan sekolah. Inovasi mengarah pada efisiensi serta hasil yang lebih baik dalam kualitas proses dan hasil belajar siswa, maka sangat perlu untuk dikembangkan inovasi dalam pendidikan. Dalam upaya untuk mengembangkan inovasi dalam pendidikan, maka seorang pendidik harus mendesain dan mengimplementasikan pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran inovatif berarti pembelajaran yang dirancang oleh guru yang tercetus dari gagasan-gagasan baru untuk memfasilitasi siswa dalam menguasai keterampilan dan mencapai hasil belajar secara maksimal (Purwadhi, 2019). Pembelajaran yang inovatif merupakan hal yang menjadi keseharusan dalam pendidikan untuk dapat memberikan pemenuhan dari kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, kompetensi guru dalam hal ini merupakan faktor utama yang dapat memberikan pengaruh atas mampu atau tidaknya dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif.

Berikutnya yang tidak kalah pentingnya dalam pembelajaran agama Hindu sebagai implementasi merdeka belajar adalah merdeka belajar mandiri dan kreatif. Belajar mandiri dimaksudkan sebagai suatu proses di mana siswa berinisiatif dengan atau tanpa bantuan dari orang lain mendiagnosis kebutuhan belajarnya, mengkonsepkan dari tujuan belajarnya, memetakan materi belajar, memilih dan menggunakan strategi atau metode belajar yang tepat, serta mengevaluasi dari proses belajarnya. Dengan demikian dalam konteks tersebut belajar mandiri dapat dilihat dari dua perspektif yakni belajar mandiri sebagai sebuah proses atau metode belajar serta belajar mandiri sebagai karakteristik pribadi siswa. Belajar mandiri sebagai proses atau metode menekankan bahwa



siswa bertanggung jawab seutuhnya terkait dengan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dari hasil belajarnya, sedangkan belajar mandiri dalam menyangkut hal karakteristik kepribadian siswa lebih mengarah pada bentuk tanggung jawab dalam keaktifan belajar, inisiatif, memiliki tujuan belajar yang jelas serta mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah belajarnya (Putra et al., 2017).

Proses pembelajaran agama Hindu dalam merdeka belajar perlu mengembangkan kreativitas siswa secara leluasa. Penggunaan strategi serta media pembelajaran yang tepat akan membantu para siswa untuk dalam menumbuhkan daya inovatif dan kreatifnya baik secara spirit belajar, literasi, penguasaan teknologi, serta kemampuannya dalam berkomunikasi dan juga keterampilan belajar mandiri. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kreativitas peserta didik adalah dengan memberikannya kesempatan yang seluas-luasnya untuk menentukan topik dan kegiatan dalam pembelajaran, khususnya dalam menyelesaikan masalah pembelajaran. Spirit merdeka belajar yang sesungguhnya adalah ketika siswa dan juga guru dapat belajar dan mengajar tanpa ada rasa yang menekan ataupun membelenggu. Dengan demikian, poin terakhir yang dapat dicapai dalam merdeka belajar pada pembelajaran agama Hindu adalah untuk menemukan keadaan belajar yang menyenangkan. Kebijakan merdeka belajar ini merupakan sebuah program yang mengharapkan untuk tercapainya iklim belajar yang menyenangkan, Susana bahagia yang didapatkan oleh siswa maupun guru. Siswa belajar dan guru mengajar dengan bahagia dan untuk bahagia.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep merdeka belajar yang dicanangkan oleh Mendikburistek berupaya untuk memberikan keleluasaan kepada guru dan juga peserta didik untuk bersama-sama mendesain model, strategi, pendekatan, metode, serta media pembelajaran yang menyenangkan, dan hal ini tentunya senada dengan aliran filsafat pendidikan progresivisme yang menghendaki suatu progres atau perubahan yang jauh lebih baik dari pembelajaran yang hanya sebatas mendikte dalam pendidikan yang konvensional. Merdeka belajar telah menghadirkan ruang pembelajaran yang natural serta sangat memungkinkan untuk peserta didik dapat bertumbuh serta berkembang sesuai dengan bidang yang mereka minati, selain itu peserta didik akan menjadi individu yang otentik dan sejalan dengan bidangnya masing-masing. Konteksnya dalam pendidikan Hindu, sudah semestinya desain pembelajaran dalam pendidikan agama Hindu memberikan ruang yang terbuka agar peserta didik dapat bertumbuh dengan leluasa. Merdeka berpikir, merdeka berinovasi, merdeka belajar mandiri dan kreatif harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian pembelajaran agama Hindu. Dengan demikian, proses pembelajaran yang menyenangkan akan tercapai, seorang anak tidak serta-merta hanya sebagai obyek belajar saja, namun antara guru dan juga siswa sama-sama menjadi subyek dalam pembelajaran. Sehingga labirin pembatas antara guru dan juga siswa telah dihapuskan dalam konsep merdeka belajar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, A. T., & Atmadja, N. B. (2008). Sertifikasi Guru: Memperkaya atau Menyejahterakan? (Perspektif Semiotika Komunikasi). *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 41(1).
- Bakker, Anton., & Zubair, A. Charris. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bernadib, I. (1997). *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Budiwati, R., & Fauziati, E. (2022). Merdeka Belajar dalam Perspektif Ki Hadjar Dewantara. *Eelementa: Jurnal PGSD STKIP PGRI Banjarmasin*, 4(1), 15–24. <https://doi.org/10.33654/pgsd>
- Daga, A. T. (2021). Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(3), 1075–1090. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i3.1279>
- Eliana, H. U., Richardo, R., & Aksen Cahdriyana, R. (2021). Progresivisme dan Perspektifnya Terhadap Pembelajaran di Era Pandemi Covid-19. *Indonesian Digital Journal of Mathematics and Education*, 8(1), 35–44. <http://p4tkmatematika.kemdikbud.go.id/journals/index.php/idealmathedu/>
- Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2020). Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia dalam Perspektif Filsafat Progresivisme. *Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 12(2), 155–164.
- Gunada, I. W. A. (2020). Nilai Susila dalam Sloka Hindu untuk Penguatan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik. *Jurnal Binawakya*, 14(8), 3035–3054.

- Gutek, L. G. (1997). *Philosophical and Ideological Perspectives on Education*. USA: A Viacom Company.
- Jalaluddin, & Idi, A. (2002). *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan Pendidikan*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kemdikbud. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Kho, L. (2007). *Homeschooling untuk Anak: Mengapa tidak?* Yogyakarta: Kanisius.
- Kilpatrick, W. H. (1980). *The Philosophy of Education*. New York: Oxford University Press.
- Kneller, G. F. (1971). *Introduction to The Philosophy of Education*. California: University of California.
- Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep Merdeka Belajar Perspektif Aliran Progressivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(1), 141–147.
- Nanuru, R. F. (2013). Progressivisme Pendidikan dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal UNIERA*, 2(2), 132–143.
- Ornstein, A., & Levine, Daniel. U. (2007). *Foundations of Educations*. USA: Wadsworth.
- Pohan, J. E. (2019). *Filsafat Pendidikan: Teori Klasik Hingga Postmodernisme dan Problematikanya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pratama, T. (2015). *Pemikiran Pendidikan H.A.R Tilaar dalam Perspektif Progressivisme* [Skripsi]. Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
- Purwadhi. (2019). Pembelajaran Inovatif dalam Pembentukan Karakter Siswa. *Mimbar Pendidikan: Jurnal Indonesia Untuk Kajian Pendidikan*, 4(1), 21–34.
- Putra, R. A., Kamil, M., & Pramudia, J. R. (2017). Penerapan Metode Pembelajaran Mandiri dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik (Studi pada Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Bina Mandiri Cipageran). *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 1(1), 23–36.
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H., & Prihantini. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basiedu*, 6(4), 6313–6319.
- Ruslan. (2018). Perspektif Aliran Filsafat Progressivisme tentang Perkembangan Peserta Didik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(2), 211–217.
- Sopacua, J., & Fadli, M. R. (2022). Konsep Pendidikan Merdeka Belajar Perspektif Filsafat Progressivisme: The Emancipated Learning Concept of Education in Progressivism Philosophy Perspective. *Potret Pemikiran*, 26(1), 1–14. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP>
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional.